

# Kebijakan Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia: Sebuah Analisis Jejaring Wacana

<sup>1</sup>Abdan Syakura

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

**Abstract** This article aims to elucidate the structure of discourse network formed on disbandment policy of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). To expose the network structure is used the actor network theory and discourse coalition concept. In addition, Discourse Network Analyzer (DNA) and Visone applications are also used as analytics tools. In this study, the network analyzed is the relationship between actors involved in the debate on the policy discourse on the disbandment of HTI. Therefore, to produce the good analysis, the Discourse Network Analysis (DNA) method is used. For the sharper analysis results, also used the concept of discourse and semantic analysis in the process of meaning actor's statement. The discourse analyzed is taken from the widespread online media on the internet. The time period of the discourse taken as the data is May until December 2017. The results of the analysis emerged three discoveries, that is the polarization is out of balance between the supporters and the repellents of the HTI disbandment, the supporters won a glorious victory in the discourse battle with the HTI policy repellent party and supporting the discourse dominance on the repellent party has emerged since the translation process. All three explained that the success of the HTI disbandment policy was also influenced by the strong structure of the discourse networks that emerged in response to the policy.

**Keywords:** HTI's disbandment, Discourse Network Analysis, Actor Network Theory, Discourse Coalition, Online Media

## 1. Pendahuluan

Pada 10 Juli 2017 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Kominfo RI Online, 2017). Revisi atas UU Ormas ini dilakukan atas dasar situasi kegentingan yang memaksa karena pemerintah menilai bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang saat ini berlaku

belum efektif untuk mengatasi permasalahan radikalisme dan ekstrimisme serta belum bisa mengontrol perkembangan (ideologi) Ormas yang semakin beragam. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan secara terbatas terkait definisi dari paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 meliputi ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme.

Salah satu Ormas yang terkena dampak dari penerbitan Perppu Ormas adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI menjadi Ormas pertama yang dicabut status badan hukumnya oleh pemerintah pasca penerbitan Perppu Ormas. Ormas ini dibubarkan karena

\* Corresponding author: Abdan Syakura

[abdanz01@gmail.com](mailto:abdanz01@gmail.com)

Published online at <http://Islamicinsights.ub.ac.id/>

Copyright © 2021 PSP2M UB Publishing. All Rights Reserved

menurut hasil kajian pemerintah, perlu diambil langkah hukum terhadap HTI mengenai dakwah dan kampanye konsep khilafah yang dianggap membahayakan serta demi menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan NKRI berdasarkan UUD 1945 (Koran Tempo Online, 2017). Kebijakan pembubaran organisasi HTI menimbulkan berbagai respon dan spekulasi di ranah publik dan elit, baik berupa dukungan ataupun penolakan.

Munculnya pernyataan dukungan dan penolakan dalam kebijakan ini membentuk suatu jejaring. Dalam konteks ini, jejaring yang terbentuk adalah jejaring wacana. Aktor yang ada di dalam jejaring ini membentuk jaringan atas dasar *common interest* yang sama, yaitu isu pembubaran HTI. Kajian tentang jejaring wacana dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai terobosan dalam memandang fenomena dan permasalahan terkait proses kebijakan pembubaran HTI. Sehingga dengan sudut pandang ini, dapat membuka kemungkinan lain terkait pemahaman dan temuan-temuan baru dalam kasus kebijakan pembubaran HTI.

Munculnya pernyataan dukungan dan penolakan dalam kebijakan ini membentuk suatu jejaring. Dalam konteks ini, jejaring yang terbentuk adalah jejaring wacana. Aktor yang ada di dalam jejaring wacana ini membentuk jaringan atas dasar *common interest* yang sama, yaitu kebijakan pembubaran HTI. Kajian tentang jejaring wacana dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai terobosan dalam memandang fenomena dan permasalahan terkait kebijakan pembubaran HTI. Sehingga dengan sudut pandang ini, dapat membuka kemungkinan yang lebih besar terkait pemahaman dan temuan-temuan baru dalam kasus kebijakan pembubaran HTI.

Setidaknya, ada tiga hal yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang kebijakan pembubaran HTI dengan menggunakan analisis jejaring wacana. *Pertama*, belum ada literatur ilmiah yang mengupas kebijakan pembubaran HTI dengan menggunakan metode jejaring wacana. *Kedua*, sebagian besar analisis tentang gerakan HTI (Bambang Prasetyo 2019; Siti Nur Fitriyana 2019; Azman 2018; Ach. Khatib 2018; Hasanuddin & Edi Sabaran Manik 2018; Ana Shabana Azmy 2017; Fitriana Hasanah 2016), berfokus pada kajian pemikiran, konsep negara khilafah, metode dakwah dan narasi dakwah HTI. Analisis berkaitan dengan wacana masih minim jumlahnya, seperti artikel dari Ali Kusno dkk., (2017) yang membahas tentang pembentukan stereotip pada HTI oleh pemerintah dengan menggunakan analisis wacana kritis.

*Ketiga*, posisi metode *Discourse Network Analysis* yang merupakan kombinasi dari analisis konten kualitatif dan analisis jejaring mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Dengan menekankan fokus kajian bukan hanya pada *material focus* (tema umum yang seringkali dibahas dalam penelitian proses kebijakan, meliputi: aktor politik, sumber daya aktor, institusi aktor, *actor's belief*) tetapi juga pada *ideational focus* (kerangka analisis *advocacy coalition*) yang fokus pada pembahasan sistem kepercayaan aktor, *policy learning* dan proses menghasilkan koalisi, termasuk relasi yang *intangibile* (Philip Leifeld, 2020). DNA memfasilitasi peneliti untuk melakukan analisis jejaring kebijakan secara material (*coordination layer*) sekaligus jejaring ideasional (*discursive layer*) (Philip Leifeld, 2020). Mempertimbangkan beberapa hal tersebut di atas, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jejaring wacana politik dalam kebijakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia?
2. Bagaimana proses translasi jejaring wacana tersebut dan perannya dalam keberhasilan kebijakan pembubaran HTI?

## 2. Pembahasan

### 2.1 Kajian Teoretik

#### 2.1.1 Actor Network Theory

*Actor Network Theory* (ANT) pertama kali muncul pada dekade 1980-an melalui riset-riset empiris dari Michel Callon, Bruno Latour dan Jhon Law (Ambar Sari Dewi, 2013). ANT memandang segala sesuatu yang ada di dalam dunia sosial dan alam sebagai efek yang terus menerus dihasilkan dari jejaring yang saling berhubungan di manapun mereka berada. Dalam mendefinisikan ANT, Jhon Law (2009) melakukan empat klasifikasi. *Pertama*, teori jaringan aktor merupakan pendekatan yang didasarkan pada studi kasus empiris. Teori itu tertanam dalam masyarakat dan diperluas melalui praktik empiris, serta praktik itu sendiri berlandaskan pada teori. *Kedua*, pendekatan jaringan aktor lebih pantas dimengerti sebagai kepekaan terhadap praktik relasionalitas dan materialitas yang ada disekitar kita. *Ketiga*, teori jaringan aktor bukanlah sebuah kredo atau dogma. *Keempat*, jika seluruh yang ada di dunia bersifat relasional, maka begitu pula dengan teks. Teks datang dari suatu tempat dan menceritakan kisah tertentu tentang jaringan tertentu.

ANT mengedepankan konsep relasional materialitas, yang melihat bahwa semua entitas akan mencapai signifikansi dalam hubungan dengan yang lainnya. Aktor sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu manusia dan non-manusia. Untuk jaringan aktor non-

manusia, ANT melihatnya sebagai gabungan dari heterogenitas tekstual, konseptual, sosial dan aktor teknologi. Kedua aktor ini, manusia dan non-manusia merupakan realitas tunggal yang membentuk jaringan aktor (Ambar Sari Dewi, 2013).

Jejaring dalam ANT, dilihat sebagai serangkaian proses translasi dalam konfigurasi-konfigurasi relasi (Ambar Sari Dewi, 2013). Menurut Callon dalam proses pembentukan jaringan (translasi) terdapat empat fase, yaitu fase problematisasi, penarikan, pelibatan dan mobilisasi (Johanes Eka Priyatna, 2013). *Pertama*, dalam fase problematisasi ini terdapat aktor kunci yang membuat perumusan masalah/isu dan memberikan translasi peran aktor lain dalam penyelesaian masalah tersebut. *Kedua*, fase penarikan yang bertujuan untuk menarik perhatian actor lain terhadap masalah/isu yang ada. *Ketiga*, dalam fase pelibatan ini, aktor-aktor yang tertarik terhadap suatu isu akan saling mendelegasikan, menjajaki dan berperan antara aktor satu dengan yang lainnya. *Keempat*, pada fase mobilisasi aktor-aktor yang membentuk jaringan sudah memiliki ikatan yang kuat dan besar. Jejaring yang ada seakan menjadi satu, meski pada hakikatnya tetap heterogen hanya saja keterikatannya begitu kuat.

#### 2.1.2 Discourse Coalition

*Discourse network analysis* memiliki sudut pandang yang sama dengan *actor network theory* dalam melihat hubungan relasional dari suatu fenomena dimana *discourse network analysis* secara spesifik menelaah tentang wacana. Wacana sendiri sangat lekat dengan telaah mengenai bahasa. Dalam konteks argumentatif, pemaknaan bahasa secara subjektif tersebut bertalian dengan konteks studi kondisi sosio-historis dari argumentasi yang diproduksi dan

kemudian diterima (Marten A. Hajer, 1993). Peran bahasa dalam kehidupan politik saat ini bukan lagi dilihat sebagai seperangkat tanda yang netral dan mendeskripsikan dunia seperti dalam tradisi positivistik, tetapi sebagai medium para aktor untuk membentuk dunia (Marten A. Hajer, 1993). Sederhananya, bahasa dalam konteks ini bersifat sosial konstruktif. Konstruksi sosial dapat dipahami sebagai pembingkai (*framing*) terhadap suatu fenomena atau isu.

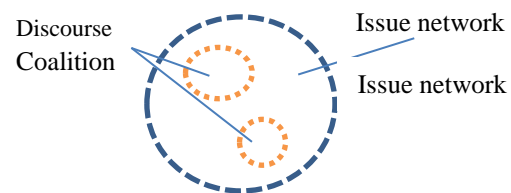
Konstruksi sosial tidak hanya muncul dari satu wacana saja, melainkan hasil dari proses diskursif-argumentatif atau dalam bahasa Hajer adalah *argumentative turn*. Pada sisi inilah menurut Hajer (1993), fungsi dari konsep *discourse coalition*. Hajer (1993) mendefinisikan koalisi wacana sebagai:

*“A discourse coalition is a group of actors who share a social construct and who try to influence policy processes by imposing their perspective on others.”*

Usaha mempengaruhi aktor lain tersebut dilakukan dengan cara pembingkai (*framing*) –*social construct*– menggunakan wacana itu sendiri.

Hajer menjelaskan bahwa ruang diskursif terbentuk dari beberapa koalisi wacana yang anggotanya mengerumuni narasi dari wacana yang dibangun (Philip Leifeld dan Sebastian Haunss, 2012). Narasi muncul sebagai hasil dari formulasi sebuah wacana pada suatu masalah yang spesifik (Hajer, 1993). Di dalam sebuah narasi yang memandang suatu masalah sebagai koalisi wacana, tidak berarti anggota-anggota koalisi wacana juga harus saling berbagi sudut pandang yang sama persis, hal ini yang membedakan konsep *discourse coalition*

dengan *advocacy coalition framework* (Harriet Bulkeley, 2000).



Gambar 1. Discourse Coalition dan Policy Networks

Sumber: Harriet Bulkeley dalam “Discourse Coalition and the Australian Climate Change Policy Network”, 2000.

Harriet Bulkeley menjelaskan kondisi koalisi wacana di dalam jejaring kebijakan. *Discourse coalition* diwakili gambar lingkaran dengan tepi garis putus-putus yang memiliki arti bahwa aktor – aktor yang ada di dalam koalisi wacana sangat mungkin menarik sudut pandang dari narasi yang berbeda, sehingga besar kemungkinan pula terjadi perpindahan antar koalisi wacana (Harriet Bulkeley, 2000). Dapat dikatakan pula, koalisi wacana bersifat cair atau tidak tetap karena interdependensi yang ada tidak hanya didasarkan pada kekuasaan dan keuntungan material, tetapi juga sumber lain seperti legitimasi, pengetahuan dan juga argumentasi (Harriet Bulkeley, 2000). Menurut Hajer, ada dua kondisi yang harus dipenuhi agar koalisi wacana dapat mendominasi sebuah fenomena, yaitu tercapainya kondisi strukturasi wacana dan institusionalisasi wacana (Hajer, 1993). Strukturasi wacana terbentuk ketika koalisi wacana mendominasi ruang diskursif sedangkan institusionalisasi wacana terjadi saat strukturasi wacana direfleksikan ke dalam praktik institusional (Hajer, 1993). Pada intinya, konsep koalisi wacana dapat menjelaskan bagaimana wacana menjadi sebuah pemaknaan terhadap aksi politik,

termasuk juga dalam konteks kebijakan publik (Joseph Szarka, 2004).

## 2.2 Metodologi Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Lokus penelitiannya adalah wacana pembubaran HTI di media daring kurun waktu bulan Mei – Desember tahun 2017. Batasan kurun waktu itu dipilih oleh peneliti karena wacana pembubaran HTI pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Mei 2017. Bulan Desember menjadi batasan waktu penelitian ini karena dinamika perdebatan pembubaran HTI di media daring meredup dan tidak menjadi bahasan secara masif.

### 2.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah media daring arus utama dan alternatif yang menyebarluaskan berita pembubaran HTI. Sedangkan objek penelitian ini adalah wacana politik pembubaran HTI. Pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pemberitaan media daring tentang pembubaran HTI yang diakses peneliti mulai dari bulan Mei hingga Desember 2017 dan teks status dari akun media sosial resmi para aktor. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber buku dan literatur ilmiah terkait dengan HTI.

### 2.2.2 Teknik Analisis dan Pemrosesan Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu proses pemaknaan pernyataan aktor dan analisis menggunakan aplikasi *Discourse Network Analyzer* (DNA) dan Visone. Dalam proses pemaknaan pernyataan aktor digunakan konsep analisis wacana dan semantik. Analisis wacana menekankan pada sisi “bagaimana”

sebuah pesan (teks komunikasi) itu disampaikan, bukan hanya pada pertanyaan “apa” (Eriyanto, 2001). Analisis ini lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari sebuah pesan baik teks ataupun lisan melalui analisis bangunan struktur kebahasaannya.

Sedangkan, semantik menurut Lehrer adalah studi tentang makna (Achamd H.P dan Alex Abdullah, 2012). Senada dengan Lehrer, Kambartel mengatakan bahwa semantik mengasumsikan bahasa terbangun dari struktur yang memperlihatkan makna jika dihubungkan dengan objek dalam pengalaman manusia (Achmad H.P dan Alex Abdullah, 2012). Kempson dalam Achmad H.P dan Alex Abdullah (2012) mengatakan bahwa untuk menjelaskan tentang istilah makna, maka harus melihat tiga hal berikut: kata, kalimat dan apa yang dibutuhkan komunikator untuk berkomunikasi. Lyons juga melihat bahwa pengkajian makna dari suatu kata adalah pemahaman dari kata tersebut yang berkaitan dengan hubungan-hubungan makna yang membedakan kata tersebut dari kata lainnya (Achmad H.P dan Alex Abdullah: 2012). Penjelasan di atas dapat memberikan pengertian bahwa analisis semantik adalah upaya pemahaman terhadap suatu kata, kalimat atau wacana yang mencakup unsur-unsur yang ada di dalamnya.

Analisis menggunakan aplikasi DNA dan Visone dilakukan melalui beberapa proses berikut:

1. Mining data
2. Filtering data
3. Coding data
4. Analisis dan Presenting data

## 2.3 Hasil Analisis

Hasil penelusuran peneliti dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan

bulan Desember tahun 2017, ditemukan sebanyak 163 aktor dengan latar belakang 162 organisasi yang berbeda. Jumlah pernyataan yang dikeluarkan oleh 163 aktor tersebut mencapai 589 pernyataan. Data itu diperoleh dari 300 artikel media daring dan 2 status media sosial aktor. Peneliti tidak hanya fokus pada satu atau beberapa media daring arus utama. Tetapi, mengambil semua artikel berita daring yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Adanya penentuan kategori berita daring ini dikarenakan dalam menganalisis jejaring wacana pembubaran HTI, peneliti perlu melihat media daring *anti-mainstream* dan juga media sosial aktor tertentu. Hal itu dilakukan agar wacana yang muncul dapat mewakili kondisi empiris - mengingat hegemoni media daring arusutama sangat kuat-, sehingga dapat terbentuk jejaring wacana sesuai dengan realitas yang ada.

### **2.3.1 Aktor-aktor dalam Jejaring Wacana Pembubaran HTI**

#### **Pemerintah**

Kelompok aktor ini terdiri dari sektor pemerintahan baik yang berada di pusat maupun di daerah. aktor dari pemerintahan pusat meliputi K/L dan lembaga yudikatif. Sedangkan aktor dari pemerintahan daerah meliputi, pemerintah provinsi dan daerah.

#### **a. Legislatif**

Kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari aktor-aktor partai politik. Meski tidak selalu anggota partai politik menjadi wakil di lembaga legislatif. Aktor legislatif ini meliputi DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Daerah. Sedangkan, aktor dari partai politik yang tidak menjadi anggota legislatif meliputi Partai Golkar, PDI Perjuangan, PAN, Nasdem, Hanura, PKB, PPP dan PKS.

#### **b. LSM / Ormas**

Aktor dari kelompok ini memiliki variasi yang cukup beragam. Meski LSM / Ormas berbasis Islam lebih dominan jumlahnya, tetapi ada pula beberapa Ormas dari golongan lain. Beberapa Ormas dari golongan Islamis meliputi Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Ikatan Pesantren Indonesia (IPI), Jaringan Ulama Muda Nusantara (JUMAT), Gerakan Reformis Islam (Garis), Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII), Majelis Muslim Papua (MMP), The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah dan Front Pembela Islam (FPI). Ormas NU yang memiliki basis massa besar serta organisasi sayap yang banyak berperan lebih dominan daripada Ormas lain. Hal itu ditunjukkan oleh banyaknya jumlah organisasi sayap NU yang ikut serta dalam jejaring wacana serta memiliki wacana yang solid.

Kelompok yang lain meliputi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Aliansi Bela Garuda (ABG), Komunitas Cinta Pancasila dan NKRI, Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Forum Silaturahmi Bangsa (FSB), Lintas Iman, Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Banteng Muda Indonesia (BMI). Selain itu, ada pula ormas yang baru mendeklarasikan diri ketika perdebatan pembubaran HTI masih berlangsung, contohnya adalah FSB. FSB dideklarasikan pada tanggal 21 Mei 2017 beberapa hari setelah pemerintah memunculkan wacana pembubaran Ormas HTI.

#### **c. POLRI / Militer**

Sebagai alat negara dan penegak hukum, POLRI dan Militer memiliki

peran strategis dalam mengendalikan wacana yang dibangun oleh pemerintah. Di dalam jejaring ini, kelompok aktor POLRI dan Militer terdapat di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun berbeda tingkatan, kelompok ini memiliki wacana yang solid.

d. Organisasi Pelajar / Kemahasiswaan

Jejaring wacana pembubaran HTI juga merambah dunia aktivisme mahasiswa. Aktor-aktor yang masuk ke dalam kelompok ini tidak hanya organisasi pelajar atau mahasiswa intra kampus, tetapi juga ekstra kampus. Beberapa merupakan organisasi pergerakan mahasiswa yang terkenal seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), IPNU, Forum Silaturahmi Mahasiswa, Hima Persis dan Himi Persis. Di samping itu terdapat pula organisasi intra kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DKI Jakarta.

e. Akademisi

Di dalam dunia akademis, terlebih para akademisi ilmu politik maupun agama Islam, kebijakan pembubaran Ormas HTI memunculkan pro dan kontra. Kelompok aktor ini beberapa memiliki pandangan yang saling berbeda satu sama lain. Kelompok ini tidak hanya terdiri dari dosen atau pakar di universitas tetapi juga di luar universitas, seperti lembaga atau komunitas akademis.

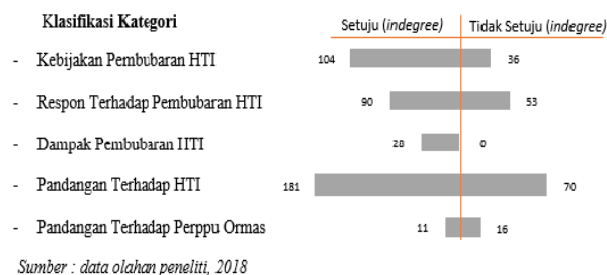
f. Praktisi

Praktisi yang ikut dalam jejaring wacana pembubaran HTI ini adalah ahli hukum. Beberapa menjadi kuasa hukum HTI dan Kemenkumham dalam beberapa kali persidangan terkait gugatan kebijakan pembubaran HTI. Kelompok aktor ini terdiri dari Mahfud MD, Margarito, Refly Harun, Irman Putra

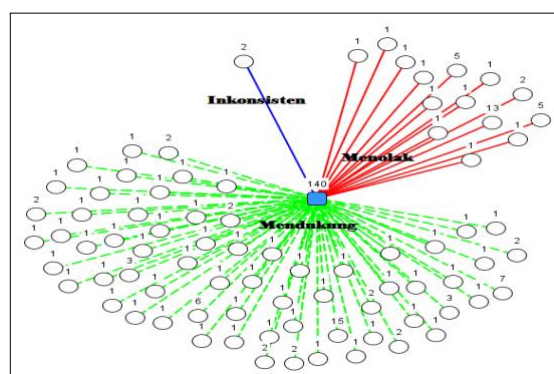
Sidin, Wayan Sudirta, Hafzan Taher, Gugum Ridho Putra dan Yusril Ihza Mahendra. Beberapa aktor yang menjadi kuasa hukum pemerintah dan HTI secara tegas mendukung pihaknya masing-masing dalam persaingan wacana di jejaring ini.

2.3.2 Kategorisasi Isu dan Analisis Affiliation Network

Peneliti menemukan 20 kategori/isu yang membangun wacana pembubaran HTI dan mengklasifikasinya ke dalam 5 kategori besar (lihat Gambar 2). Dari pengklasifikasian kategori tersebut, kemudian dianalisis dengan aplikasi DNA menggunakan algoritma affiliation network yang memiliki fungsi melihat hubungan bipartite antara kategori/isu dengan aktor yang muncul.



Gambar 2. Analisis Affiliation Network



Gambar 3. Jejaring Kategori Kebijakan Pembubaran HTI

Gambar di atas menjelaskan bahwa klasifikasi kategori yang menjadi pusat perhatian dan perdebatan dalam jejaring wacana pembubaran HTI adalah

“pandangan terhadap HTI”. Terdapat 251 pernyataan positif dan negatif terhadap klasifikasi ini. Jumlah pernyataan tersebut juga memiliki variasi tekstual yang beragam. Di dalamnya terdapat 6 kategori yang memberikan penilaian tentang organisasi HTI selama eksis di Indonesia. Antara lain kategori HTI anti Pancasila dan NKRI, HTI meresahkan masyarakat dan Peran HTI dalam pembangunan serta HTI organisasi politik dan Legalitas HTI.

Dari 6 kategori tersebut, terdapat pernyataan dominan yang setuju bahwa ideologi HTI bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dengan jumlah 110 pernyataan, sedangkan yang menolak 49 pernyataan. Tidak berbeda jauh, dalam kategori peran HTI dalam pembangunan dan HTI meresahkan masyarakat jumlah pendukungnya masih didominasi oleh aktor-aktor yang menilai negatif HTI. Meski dalam kategori peran HTI dalam pembangunan, aktor pendukungnya unggul secara kuantitas tetapi secara variasi aktornya masih lebih rendah dibandingkan aktor yang menolak.

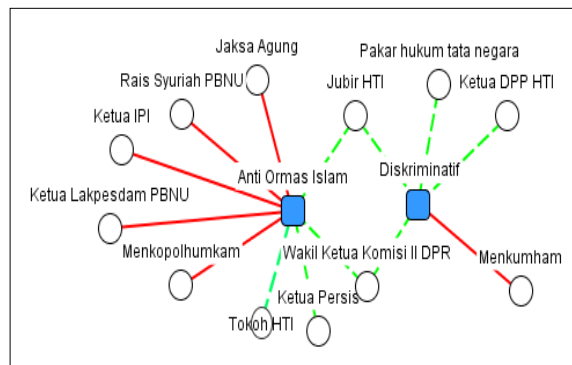
Dalam kategori HTI organisasi politik dan Legalitas HTI, pernyataan aktor memberikan temuan yang menarik, yaitu sebagian besar mengatakan bahwa organisasi HTI legal secara hukum, namun di sisi lain, organisasi HTI pada dasarnya adalah organisasi politik yang dibungkus dengan gerakan keagamaan. Hal ini memberikan pengertian bahwa meski HTI sah secara hukum sebagai Ormas, namun kegiatannya malah menunjukkan seperti partai politik.

### 2.3.3 Relasi Jejak Digital Aktor Organisasi dalam Jejaring Pembubaran HTI

Terlihat dari gambar di atas bahwa pernyataan yang mendukung kebijakan pembubaran HTI lebih dominan dari

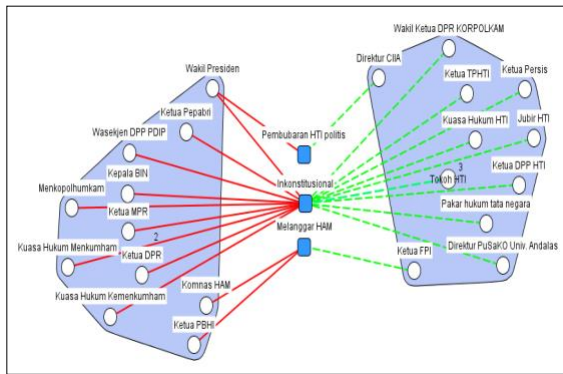
pada yang menolak. Jumlahnya mencapai 104 pernyataan yang sepakat dengan pemerintah dalam pembubaran HTI. Sedangkan yang menolak jumlah hanya 36 pernyataan pihak pendukung pun juga memiliki variasi aktor yang lebih beragam. Jendral Wiranto dengan 15 pernyataan menjadi aktor utama yang mendukung kategori ini. Meski pihak yang menolak pembubaran HTI kalah frekuensi, variasi aktornya cukup beragam.

Terdapat 15 latar belakang organisasi yang tersebar di dalam 36 pernyataan penolakan pembubaran HTI. Aktor utamanya Ismail Yusanto (HTI) dengan 13 pernyataan. Di dukung oleh aktor lain seperti Amien Rais (PAN), Fadli Zon, Syamsul Rizal P (Peneliti PSKP UGM), Ikhsan Abdullah (MUI), Boni Hargens dan Habib Rizieq. Selain itu, terdapat pula aktor yang inkonsisten dalam mengeluarkan pernyataan, yaitu Dahnil Anzhar Simanjutak (Ketum Pemuda Muhammadiyah). Dahnil di satu sisi mengeluarkan pernyataan bahwa pembubaran HTI sudah tepat, namun kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Pemuda Muhammadiyah tidak mendukung kebijakan pembubaran,



Gambar 4. Jejaring Kategori Pembubaran HTI anti Ormas Islam dan Diskriminatif





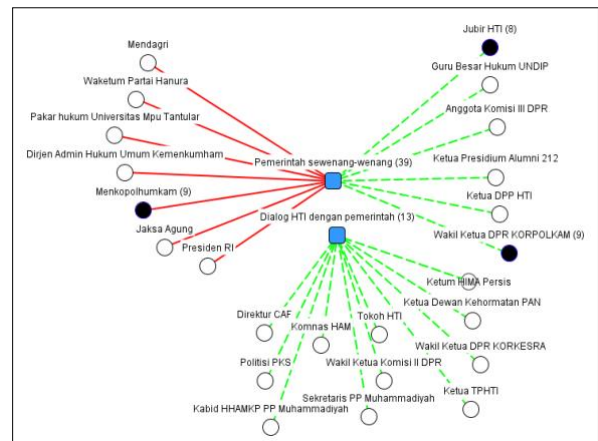
Gambar 3. Jejaring Kategori Pembubaran HTI Politis, Inkonstitusional dan Melanggar HAM

tetapi lebih mendorong kepada sikap berdialog.

Gambar di atas menunjukkan bahwa pihak yang menilai negatif/menolak dua kategori ini lebih unggul kuantitasnya daripada yang mendukung. Dari keseluruhan jumlah pernyataan, Wiranto yang paling mendominasi dengan 10 pernyataan. Variasi dari aktor yang mendukung dan menolak juga sama-sama cukup beragam. Pemerintah dengan NU serta organisasi sayapnya, sedangkan HTI dengan kader partai Gerindra, pakar hukum tata negara serta Persis.

Gambar di atas menunjukkan visualisasi dari 3 kategori/wacana sekaligus yaitu kategori pembubaran HTI politis, Inkonstitusional dan Melanggar HAM. Jumlah pernyataan yang masuk mencapai 33 pernyataan, meliputi 15 pernyataan positif dan 18 pernyataan negatif.

Dari ketiga kategori tersebut, yang memiliki diskursifitas tinggi adalah kategori pembubaran HTI inkonstitusional yang juga membahas tentang proses dan mekanisme pembubaran yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan. Aktor-aktor seperti Ismail Yusanto, Felix Siauw, Jeje Zaenuddin dan Yusril Ihza Mahendra



Gambar 6. Jejaring kategori Dialog HTI dengan Pemerintah dan Pemerintah Sewenang-wenang

menganggap bahwa pembubaran HTI melalui Perppu Ormas merupakan tindakan yang melanggar hukum, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang Ormas.

Di samping itu, pihak pemerintah menilai bahwa pembubaran HTI telah sesuai dengan prosedur karena berlandaskan kepentingan nasional. Secara keseluruhan, ketiga kategori tersebut menjadi ajang persaingan yang seimbang bagi pihak pendukung dan penolak kebijakan pembubaran HTI. Sebanyak 14 pernyataan menolak dan 18 pernyataan mendukung.

Dua kategori di atas memiliki frekuensi sebanyak 52 pernyataan. Dari jumlah tersebut, yang mendukung kedua kategori sebanyak 35 pernyataan. Sedangkan, pernyataan yang menolak hanya ada di kategori pemerintah sewenang-wenang dengan jumlah 17 pernyataan. Pada dua kategori ini, peneliti melihat bahwa inilah momen baik yang dimiliki oleh aktor dengan penilaian negatif terhadap kebijakan pembubaran HTI dan memandang bahwa seharusnya pemerintah melakukan dialog terlebih dahulu dengan HTI, bukan langsung mencabut status badan hukum HTI. Pihak yang setuju dengan kategori ini memberikan pernyataan yang cukup

variatif. Pada kategori ini peneliti menilai bahwa dari segi kualitas pernyataan, pendukung HTI lebih unggul dari pendukung kebijakan pembubaran karena ragamnya aktor dan pernyataan yang dikeluarkan.

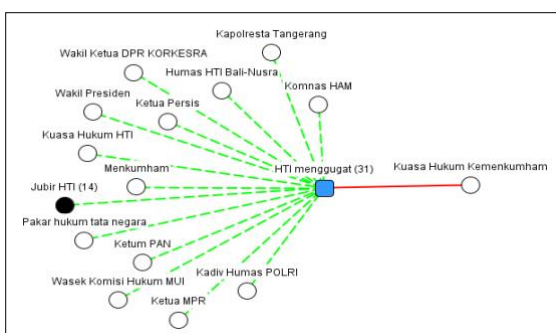
Seperti Felix Siauw melalui akun *Facebook*-nya menanggapi kebijakan pembubaran HTI dengan membuat sebuah pertanyaan retorik bernada protes, yaitu *“ide-ide yang disampaikan Hizbut Tahrir pun terbuka dan bisa diakses siapa saja, jika dikatakan anti Pancasila di bagian mananya? Kenapa tidak didiskusikan?”*. Hidayat Nurwahid juga mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang konstruktif dan tidak sekedar menuduh seperti mengundang HTI dan mengajak mereka berdialog. Maneger Nasution mengutarakan kesepakatannya bahwa pemerintah harus mengedepankan dialog. Tidak elok jika pemerintah mempertontonkan perilaku membabi buta memberangus pihak yang tak sepaham dengan pemerintah melalui stigma anti NKRI dan Pancasila. Busyro dan Abdul Mu’ti juga mempertanyakan tindakan pemerintah yang tidak mendahulukan dialog dengan HTI. Fahri Hamzah menyebut pula bahwa seharusnya pemerintah melakukan dialog persuasif dengan HTI. Yusril bahkan mengatakan kalau perlu dialog HTI dengan pemerintah disiarkan langsung di televisi. Narasi seperti ini tentu menjadi

modal yang bagus untuk memperkuat posisi mereka di dalam jejaring wacana pembubaran HTI.

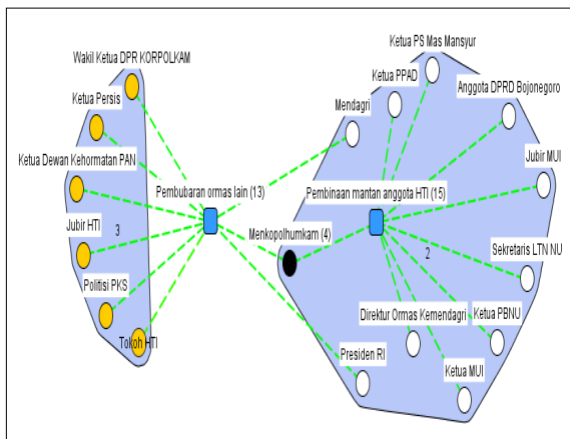
Berbeda dengan sebelumnya, di dalam kategori ini, pernyataan aktor yang mendukung gugatan HTI kepada pemerintah baik gugatan Perppu Ormas ataupun SK Kemenkumham tidak dapat selalu dinilai sebagai sikap dukungan kepada organisasi HTI. Seperti yang terlihat pada gambar 7, aktor dari organisasi pemerintah ataupun Ormas dan partai politik yang memiliki kedekatan dengan HTI, beberapa memiliki sikap yang mendukung dalam kategori ini. Frekuensi yang masuk ke dalam kategori ini sebanyak 30 pernyataan setuju dan 1 pernyataan tidak setuju.

Aktor yang memiliki latar belakang instansi pemerintahan dan cenderung mendukung pemerintah meliputi Setyo Wasisto (Polri), Jusuf Kalla, Zulkifli Hasan (Ketua MPR/PAN), Erfandi (MUI), Sabilul Arif (Polresta Tangerang) dan Yasonna Laoly (Menkumham). Semua aktor tersebut secara kompak mengeluarkan pendapat setuju dengan proses gugatan pengadilan yang diajukan HTI. Namun, bila dicermati konteks pernyataannya, mereka tidak mengarahkan tujuannya untuk mendukung HTI, tetapi sebagai bentuk pernyataan sikap bahwa pemerintah memang tidak melanggar hukum dan keluar prosedur dalam kebijakannya membubarkan HTI.

Jika sikap aktor pemerintah mendukung kategori HTI menggugat sebagai senjata untuk memperkuat pernyataan mereka dikategori yang lain, aktor HTI dan pendukungnya setuju dengan gugatan HTI sebagai bentuk



Gambar 7. Jejaring Kategori HTI menggugat



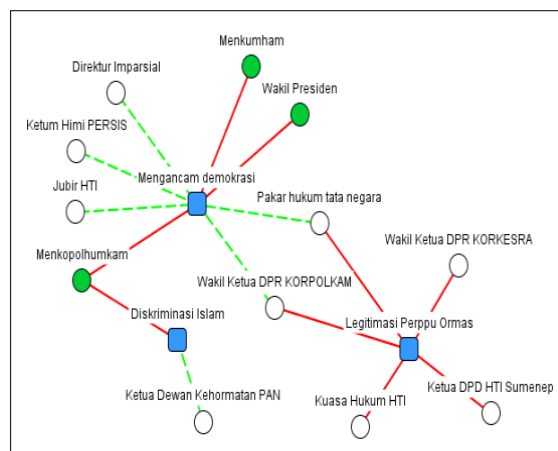
Gambar 4. Jejaring Kategori Dampak Pembubaran HTI

pertahanan diri sekaligus perlawanan terhadap kebijakan pembubaran HTI. Di dalam mengeluarkan pernyataan di kategori ini, sebenarnya HTI juga dalam posisi yang dilematis. Pada beberapa kategori sebelumnya, seperti pembubaran HTI inkonstitusional, melanggar HAM dan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah, HTI mengeluarkan pernyataan yang menilai bahwa pembubaran organisasinya tidak sesuai prosedur. Tetapi, dukungan dalam kategori ini secara tidak langsung juga mematahkan penilaian mereka terhadap kebijakan pembubaran HTI dan Perppu Ormas.

Sebanyak 28 pernyataan masuk ke dalam dua kategori ini. Tiga belas pernyataan *indegree* ke kategori pembubaran ormas lain dan lima belas *indegree* ke kategori pembinaan mantan anggota HTI. Tidak ada pernyataan yang menolak dua kategori tersebut. Aktor-aktor yang masuk ke dalamnya terdiri dari aktor pendukung HTI dan pendukung kebijakan pembubaran HTI. Pada gambar 8 peneliti membagi aktor dalam dua *group* yang berbeda. Aktor yang diberi warna kuning menunjukkan dukungan kepada organisasi HTI. Sedangkan yang berwarna mendukung pemerintah. Aktor yang condong dengan HTI dan setuju

dengan kategori pembubaran Ormas lain secara kuantitas dan kualitas narasi lebih unggul dari aktor pendukung pemerintah. Ismail Yusanto, Felix Siauw, Mahfudz Shiddiq (Politisi PKS), Fadli Zon, Amien Rais dan Jeje Zaenuddin sebagai aktor yang condong dengan HTI memberikan pernyataan yang relatif sama.

Meski sama-sama setuju dengan kategori pembubaran Ormas lain, aktor pendukung pemerintah, Joko Widodo dan Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa memang akan ada rencana pemerintah membubarkan Ormas lagi selain HTI. Namun, berbeda makna dengan aktor sebelumnya, Joko Widodo, Tjahjo Kumolo dan Wiranto menegaskan bahwa pembubaran Ormas selain HTI ditujukan kepada Ormas yang anti dengan Pancasila dan mengancam bangsa serta melalui kajian mendalam. Peneliti melihat pernyataan Joko Widodo, Tjahjo Kumolo dan Wiranto tersebut paradoksal. Di satu sisi, mempertebal kesan kemutlakan pemerintah dalam memberikan penilaian terhadap makna “Ormas anti Pancasila” dan bisa memberikan penilaian bahwa pemerintah represif. Namun, di sisi yang lain, pernyataan tersebut juga memberikan kesan bahwa pemerintah bertindak tegas dan cepat tanggap dalam masalah yang



Gambar 9. Jejaring Kategori Pandangan Terhadap Perppu Ormas

menyangkut persatuan bangsa dan negara.

Kondisi berbeda terjadi di kategori pembinaan mantan anggota HTI. Aktor yang masuk pada kategori ini dan memberikan persetujuan secara tidak langsung juga setuju dengan kebijakan pembubaran HTI. Hal itu karena makna dari pembinaan mantan anggota HTI adalah memberikan kerelaan dan persetujuan bahwa HTI sah dibubarkan dan anggotanya perlu dibina agar tidak menyeweng.

Frekuensi yang masuk ke dalam tiga kategori tersebut sebanyak 27 pernyataan. Rinciannya 11 pernyataan setuju dan 16 pernyataan tidak setuju. Kategori Perppu Ormas mengancam demokrasi dan diskriminasi Islam memiliki pemaknaan yang berbeda dengan kategori legitimasi Perppu Ormas. Aktor yang menolak kategori legitimasi Perppu Ormas menandakan penolakan latar belakang penerbitan Perppu Ormas. Sedangkan, pada kategori Perppu Ormas mengancam demokrasi dan diskriminasi Islam, aktor yang mendukung berarti menilai bahwa penerbitan Perppu Ormas memberi dampak negatif bagi umat Islam dan iklim demokrasi di Indonesia.

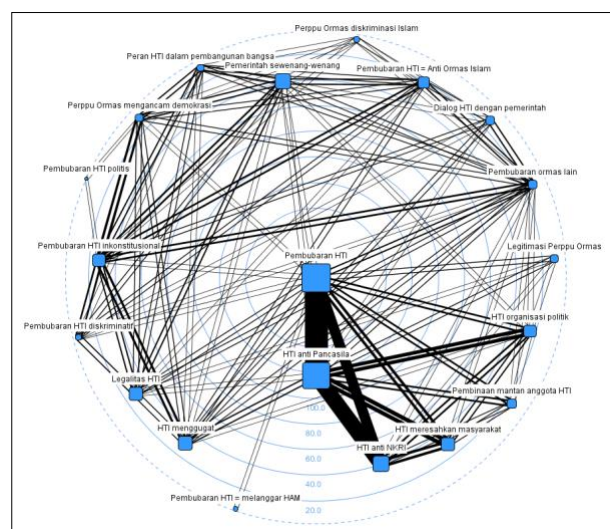
Kategori Perppu Ormas mengancam demokrasi dan diskriminasi Islam memiliki pernyataan setuju dan tidak setuju. Variasi aktor yang setuju terdiri dari Ismail Yusanto, Fadli Zon, Irman Putra Sidin (pakar hukum tata negara), Amien Rais. Al Araf (Direktur Imparsial) dan Lida Maulida (Ketum Himi Persis). Berbeda dengan sebelumnya, kategori legitimasi Perppu Ormas hanya memiliki *indegree* yang tidak setuju. Meski aktor yang masuk pada kategori ini semuanya tidak setuju, bukan

berarti tidak ada pihak yang mendukung legitimasi Perppu Ormas.

Di beberapa kategori yang lain, peneliti melihat ada pernyataan-pernyataan dari aktor yang secara teks tidak memperlihatkan dukungan terhadap legitimasi Perppu Ormas, tetapi secara konteks dan maknanya memberikan dukungan terhadap legitimasi Perppu Ormas. Jumlah pernyataan yang masuk ke dalam kategori legitimasi Perppu Ormas sebanyak 11 pernyataan. Variasi aktornya terdiri dari Fahri Hamzah, Fadli Zon, Mohammad Rusli (Ketua DPD HTI Sumenep), Yusril Ihza Mahendra (kuasa hukum HTI), Refli Harun dan Margarito (pakar hukum tata negara).

### 2.3.4 Analisis Concept Congruence Jejaring Pembubaran HTI

Gambar 10 Memperlihatkan visualisasi analisis kongruensi konsep/kategori yang muncul di dalam jejaring wacana pembubaran HTI. Kategori Pembubaran HTI dan HTI anti Pancasila menjadi isu yang paling tinggi diskursifitasnya sehingga letaknya berada di tengah lingkaran. Kategori pembubaran HTI memiliki jumlah



Gambar 10. Analisis Concept Congruence dalam Jejaring Wacana Pembubaran HTI

frekuensi terbanyak dengan jumlah 140 pernyataan. Di bawahnya, kategori HTI anti-Pancasila dengan 118 pernyataan. Dua kategori tersebut merupakan yang paling signifikan dibandingkan kategori yang lain. Delapan belas kategori lainnya tersebar dengan jumlah frekuensi pernyataan tidak lebih dari 60 pernyataan. Jumlah tersebut direpresentasikan melalui garis-garis lingkaran yang memiliki kelipatan 20 pernyataan di setiap jenjangnya.

Kategori pembubaran HTI dan HTI anti Pancasila jika dilihat dari jumlah *indegree*-nya memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh. Kategori pembubaran HTI dengan frekuensi lebih banyak dibandingkan kategori HTI anti Pancasila memiliki *indegree* lebih kecil, yaitu 7,579. Sedangkan kategori HTI anti Pancasila memiliki *indegree* sebesar 9,053. Angka tersebut menunjukkan posisi kategori HTI anti Pancasila dalam analisis *concept congruence* lebih kuat dan banyak dibahas oleh aktor yang ada di dalam jejaring wacana kebijakan pembubaran HTI daripada kategori pembubaran HTI. Dapat dikatakan pula, isu tentang HTI anti Pancasila menjadi topik yang paling sering dibahas dalam perdebatan wacana tentang pembubaran HTI.

### **2.3.5 Discourse Coalition: Pemerintah vis a vis HTI**

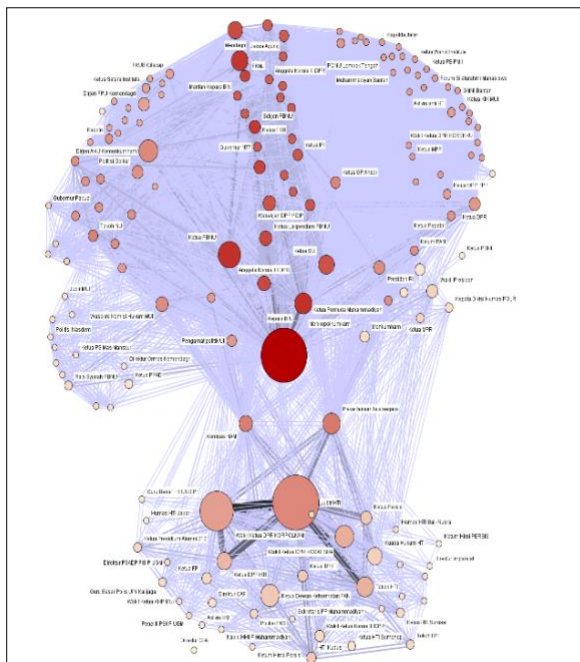
Dua pihak dalam jejaring ini saling bersaing memenangkan wacana publik, yaitu pemerintah dengan wewenang dan kekuasaan serta HTI dengan perlawanannya. Pada sub-bab sebelumnya telah dipaparkan tentang bagaimana variasi organisasi, pernyataan dan kecenderungan dukungan dari tiap aktor yang ada dalam jejaring wacana ini. Klasifikasi argumentasi aktor pun memperlihatkan bahwa dari sekian banyak aktor, terdapat aktor-aktor yang

memiliki persamaan minat dalam satu kategori/isu atau lebih.

Adanya persamaan tersebut dalam konteks jejaring memiliki dua kemungkinan, konsolidasi wacana antar aktor bila saling mendukung dan merebut wacana aktor lain bila berlawanan pihak. Hubungan ini dapat dianalisis melalui algoritma *number of co-occurrences* dalam *software* Discourse Network Analyzer (DNA). Algoritma ini berfungsi untuk mengukur kesamaan isu/kategori yang dimana aktor mengeluarkan wacana yang dilihat dari jumlah *occurrences* antara dua aktor.

Hasil analisis dan visualisasinya memperlihatkan bahwa polarisasi dan pertarungan wacana yang terjadi antara kedua pihak tidak seimbang, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Jumlah pernyataan, variasi aktor dan kongruensi dari pihak pendukung pembubaran HTI lebih besar daripada pihak yang menolak.

Meski begitu, pada gambar 11 terlihat beberapa aktor dari kedua belah pihak memiliki ketertarikan yang sama dalam beberapa isu yang dianggap potensial untuk memperkuat wacana dan jaringan masing-masing. Kategori/isu itu seperti HTI anti-Pancasila, pembubaran HTI, pembubaran ormas lain, Pemerintah sewenang-wenang dan pelanggaran HAM.



Gambar 11. Actor Congruence Network dalam Jejaring Wacana Kebijakan Pembubaran HTI

Gambar 11 menyajikan visualisasi jejaring wacana pembubaran HTI dengan algoritma *number of co-occurrences*.

Perbedaan cukup besar terlihat antara wacana yang dikeluarkan aktor penolak dan aktor pendukung kebijakan pembubaran HTI. Aktor pendukung kebijakan pembubaran HTI lebih solid dan memiliki *indegree* yang lebih kuat. Wacana pendukung pemerintah ini terbentuk dari tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kuat dimasyarakat. Seperti Wiranto, ketua PBNU, Ketua MUI, Presiden, Wakil Presiden RI, Menkumham, Ketua MPR, Ketua DPR, Rais Syuriah PBNU, Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri serta elit partai politik, organisasi sayap NU, FKUB, sebagian aktor dari Muhammadiyah dan actor-aktor lainnya. Di dalam visualisasi tersebut posisi pihak pendukung kebijakan pembubaran HTI berada di sisi sebelah atas gambar jejaring, sedangkan posisi aktor penolak kebijakan pembubaran HTI berada di sisi bawah.

Jumlah aktor penolak kebijakan lebih sedikit dibandingkan pendukung pembubaran HTI. Variasi aktornya juga lebih kecil meliputi Jubir dan Sekretaris Umum HTI, Persis, Wakil ketua DPR Korpolkom dan Korkesra, Dewan Kehormatan PAN, sebagian aktor akademisi, FPI, sebagian aktor dari Muhammadiyah, aktivis HMI, kuasa hukum HTI serta beberapa lain. Hal ini membuat koalisi wacana aktor yang menolak kebijakan pembubaran HTI lebih lemah dibandingkan dengan yang mendukung kebijakan pembubaran.

Peneliti menyadari bahwa kuat tidaknya posisi koalisi wacana dari kedua belah pihak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kekuatan hubungan antara HTI dengan organisasi sayapnya serta simpatisan dari organisasi lain, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah media massa. Wacana yang mendukung HTI lebih banyak muncul pada media daring yang bukan arus utama. Sebagian juga melalui media massa atau website organisasi-organisasi tertentu. Sebaliknya, pendukung kebijakan pembubaran HTI wacananya sangat mudah ditelusuri di media daring arus utama. Sebagian besar media daring yang terkenal juga meliputi pernyataan-pernyataan dari aktor yang mendukung pembubaran HTI.

Dalam prosesnya, jejaring wacana kebijakan pembubaran HTI seperti pada gambar analisis *actor congruence* tidak langsung muncul dengan besar begitu saja. Mengingat argumentasi Hajer tentang kesuksesan narasi koalisi wacana dalam mendominasi ruang diskursif dan mendapatkan legitimasi dalam memandang suatu masalah, kondisi strukturasi dan institusionalisasi wacana menjadi poin penting.

Persaingan wacana HTI dan pemerintah muncul ketika pemerintah mengeluarkan pernyataan politis bahwa organisasi HTI akan segera dibubarkan karena memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan memiliki cita-cita politik menjadikan Indonesia negara islam (*kebilafah*). Tidak perlu banyak waktu bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan legitimasi dan mendukung wacana kebijakan pembubaran HTI itu. Tokoh-tokoh religius-nasionalis menempatkan sudut pandang yang sama dengan wacana pemerintah dalam memandang eksistensi HTI. Wacana ini dengan sendirinya mulai masuk ke dalam kondisi *discourse structuration*. Aktor-aktor yang mengikuti narasi pemerintah ini berkembang, beberapa dari kelompok akademisi, politik, dan Ormas. Konsolidasi antar aktor dalam wacana ini semakin kuat baik secara jumlah atau variasi organisasi.

Di sisi lain, HTI juga melakukan perlawanan terhadap wacana kebijakan pembubaran organisasinya. HTI melalui beberapa tokohnya menyatakan bahwa organisasi mereka hanya menjalankan dakwah Islam yang mana hal itu tidak melanggar atau mengancam eksistensi Pancasila dan NKRI. Narasi mereka juga menentang mekanisme pembubaran HTI melalui Perppu Ormas. Wacana tandंगा yang dimunculkan mengenai sikap represif pemerintah di masa reformasi yang seharusnya mengedepankan kebebasan berserikat dan berekspresi. Hal itu juga dikaitkan dengan historitas rezim orde baru yang sangat represif terhadap Ormas, terutama yang berbasis gerakan massa dan Islamisme. Selama kurun waktu bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2017, koalisi wacana pendukung pemerintah yang pada akhirnya mendominasi ruang diskursif wacana kebijakan pembubaran HTI. Narasi wacana pihak pendukung lebih

terstrukturasi daripada narasi wacana penolak kebijakan.

Kemudian lembaga negara seperti POLRI, TNI, BIN dan dinas di daerah serta kampus-kampus merefleksikan wacana pihak pendukung tersebut ke dalam kebijakan institusinya. Hal itu dapat terlihat dari peringatan-peringatan dan ancaman pemecatan yang diberikan beberapa kampus kepada civitas akademiknya yang terbukti terlibat dalam gerakan HTI. Posisi wacana penolak pembubaran HTI pun semakin tenggelam. Praktis hanya melalui peradilan, HTI dapat melakukan perlawanan yang cukup berarti. Wacana pendukung pembubaran HTI pada kondisi ini adalah bentuk dari *discourse institutionalization*.

### **2.3.6 Translasi Jejaring Wacana Pembubaran HTI**

Translasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembentukan jejaring melalui penyesuaian kepentingan/*interest* yang beragam dari rangkaian aktor dengan kepentingan aktor fokus (utama) (Ambar Sari Dewi, 2013). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada empat tahapan/fase dalam proses translasi menurut Michel Callon. Tahapan tersebut meliputi fase problematisasi, fase penarikan, fase pelibatan dan fase mobilisasi. Peneliti akan membedah jejaring wacana kebijakan pembubaran HTI menggunakan empat fase translasi yang digagas oleh Callon.

#### **a. Fase Problematisasi**

Fase problematisasi ini dapat dikatakan sebagai tahap awal dari terbentuknya suatu jaringan. Ada aktor yang muncul dan menghadirkan suatu isu/masalah untuk mencari perhatian orang/pihak lain sehingga isu yang dimunculkan aktor inisiator tersebut

ditransformasikan ke dalam masalah-masalah yang diterjemahkan aktor lainnya (Ambar Sari Dewi, 2013). Di dalam konteks jejaring wacana kebijakan pembubaran HTI, aktor yang menjadi inisiator adalah Pemerintah. Lebih spesifik lagi, pemerintah diwakili oleh Wiranto selaku Menkopolkam. Pada 8 Mei 2017, Wiranto mengeluarkan pernyataan politis –saat itu landasan hukum pembubaran belum ada- yang memberitahukan kepada masyarakat bahwa organisasi HTI akan dibubarkan dengan menyertakan beberapa alasannya.

#### b. Fase Penarikan

Ketika fase problematisasi berhasil, aktor-aktor lain yang terstimulasi dengan isu/masalah yang diangkat akan memiliki kemungkinan untuk menolak atau mendukung isu tersebut (Ambar Sari Dewi, 2013). Aktor utama penyebar isu/masalah akan melakukan penguatan hubungan dengan aktor yang mendukungnya. Setelah Pemerintah mengeluarkan pernyataan akan membubarkan organisasi HTI, ada pihak yang menolak dan mendukung rencana tersebut. Sepanjang bulan Mei 2017 sudah ada lebih dari 80 aktor yang congruence dengan pernyataan Wiranto. Jumlah itu berbeda jauh dengan aktor penolak kebijakan. Jumlahnya hanya berkisar 20-an aktor yang congruence dengan Ismail Yusanto. Hal itu menunjukkan proses penarikan aktor-aktor lain ke dalam jaringan yang dilakukan pemerintah berjalan lebih baik.

#### c. Fase Pelibatan

Pada tahap ini aktor-aktor yang telah tertarik dan masuk ke dalam jaringan akan saling melibatkan diri dan menjajaki kompetensi antara satu dengan yang lainnya (Ambar Sari Dewi, 2013). Aktor-aktor yang ada di dalam jejaring wacana kebijakan pembubaran HTI melibatkan diri mereka sesuai peran dan

kompetensinya masing-masing. Aktor utamanya, yaitu pemerintah mendefinisikan peran dari aktor-aktor tersebut. Hal ini terlihat ketika pemerintah menanggapi masalah terkait legalitas dasar hukum pembubaran HTI termasuk penerbitan Perppu Ormas. Pemerintah mendorong kepada pihak yang tidak setuju dengan pembubaran HTI serta Perppu Ormas untuk melakukan gugatan di pengadilan.

#### d. Fase Mobilisasi

Fase pelibatan yang telah terlewati dengan baik akan mampu mengarahkan jaringan menuju bentuk yang semakin kuat. Jaringan juga akan memiliki eksistensi spasial dan temporal serta para aktor akan mencapai kondisi konvergen, meski pada dasarnya mereka tetap heterogen (Ambar Sari Dewi, 2013). Di dalam jejaring wacana ini, mobilisasi para aktor tercermin dari munculnya diskusi/kajian yang membahas pembubaran HTI. Baik kajian yang tujuannya mendukung pembubaran HTI atau menolaknya. Kajian-kajian ini dilakukan oleh aktivis mahasiswa, ormas-ormas dan juga beberapa lembaga pemerintahan. Dengan melakukan berbagai kajian, wacana dari pihak pemerintah ataupun HTI akan menyebar kepada masyarakat luas, utamanya dalam golongan terdidik. Selain itu, mobilisasi ini juga menandakan penerimaan dan peleburan diri secara penuh dari aktor ke dalam jejaring wacana pembubaran HTI.

Dari pemilahan berdasarkan empat fase tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah sebagai inisiator dalam jejaring wacana kebijakan pembubaran HTI mampu menarik aktor-aktor lain untuk melibatkan diri mereka dalam wacana yang sedang pemerintah bangun dengan baik. Wacana penolakan tidak mampu memberikan pengaruh yang



signifikan terhadap kebijakan pembubaran HTI.

### 3. Kesimpulan

Analisis jejaring wacana pembubaran HTI ini menunjukkan adanya dua kubu yang saling bersaing memperkuat wacananya, yaitu pendukung dan penolak kebijakan pembubaran HTI. Kedua kubu tersebut membangun koalisi wacana untuk memperkuat pengaruhnya di dalam jejaring. Beberapa temuan dalam analisis ini antara lain:

1. Beberapa hal yang menyebabkan pihak pendukung kebijakan pembubaran HTI mendominasi persaingan wacana jejaring ini adalah para aktor pendukung tersebut lebih banyak dan beragam secara kuantitas, memiliki kongruensi pernyataan yang lebih besar dibandingkan pihak penolak kebijakan dan juga lebih terlihat/banyak muncul di dalam media khususnya media arus utama. Wacana yang dibangun oleh aktor-aktor ini mampu memenuhi dua kondisi dimana koalisi wacana dapat mendominasi ruang diskursif, yaitu *discourse structuration* dan *discourse institutionalization*.
2. Dominasi pendukung pembubaran HTI di hampir setiap kategori/isu yang membangun jejaring wacana ini, memperkokoh posisinya di dalam diskursifitas publik.
3. Dari proses translasi jejaringnya, pemerintah yang menjadi aktor utama sekaligus inisiator dalam jejaring wacana ini memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan organisasi HTI yang dibubarkan. Setiap fase mulai dari problematisasi, penarikan, pelibatan hingga mobilisasi, pemerintah mampu memanfaatkan

setiap momen untuk memperkuat dukungan wacana dari actor-aktor lainnya.

### Daftar Pustaka

- Bulkeley, Harriet, (2000), "Discourse Coalitions and the Australian Climate Change Policy Network", *Environment and Planning C: Government and Policy*, Vol. 18, Hal. 727 – 748
- Dewi, Ambar Sari, (2013), "Membuat E-Government Bekerja Di Desa: Analisis Actor Network Theory Terhadap Sistem Informasi Desa Dan Gerakan Desa Membangun", *Jurnal Mandatory IRE*, Vol. 10, No. 2, hal. 94, Yogyakarta.
- Eriyanto, (2001), *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LkiS, Yogyakarta.
- Hajer, Marteen A. (1993), "Discourse Coalitions and The Institutionalization of Practice: The Case of Acid Rain in Britain" dalam *The Argumentative Turn in Policy Analysis*, diedit oleh Frank Fischer dan John Forester, Duke University Press, Durham dan London.
- H.P., Achmad dan Alex Abdullah, (2012), *Linguistik Umum*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Idrus, Muhammad, (2009), *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Irsyan Hasyim dan Elik S, (2017), "Kemenkumham Beberkan 5 Poin Alasan Pembubaran HTI", <https://nasional.tempo.co/read/892605/kemenkumham-beberkan-5-poin-alasan-pembubaran-hti>,

diakses pada 29 September 2017,  
pukul 10:50 WIB

Johanes Eka Priyatna, Johanes Eka,  
(2013), “Potensi Teori Jaringan  
Aktor Untuk Memahami Inovasi  
Teknologi”, Universitas Sanata  
Dharma, Yogyakarta.

Kominfo RI, (2017), “Pemerintah  
Keluarkan Perppu No. 2/2017  
Tentang Perubahan Atas Undang-  
undang Ormas”,  
[https://kominfo.go.id/index.php/  
content/detail/10094/pemerintah-  
keluarkan-perppu-no-22017-  
tentang-perubahan-atas-undang-  
undang-ormas/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr),  
diakses pada 12 Juni 2021, pukul  
14:31 WIB

Leifeld, Philip dan Sebastian Haunss,  
(2012), “Political Discourse  
Network and The Conflict Over  
Software Patents in Europe”,  
*European Journal of Political Research*,  
hal. 382–409, Blackwell Publishing,  
Oxford.

Leifeld, Philip, (2020), “Policy Debates  
and Discourse Network Analysis: A  
Research Agenda”, *Cogitatio:  
Politics and Government Journal*,  
Vol. 8, No. 2, Lisbon.

Sobur, Alex, (2012), *Analisis Teks Media:  
Suatu Pengantar Untuk Analisis  
Wacana, Analisis Semiotik dan  
Analisis Framing*, Rosda, Bandung.

Szarka, Joseph, (2004), “Wind Power,  
Discourse Coalition and Climate  
Change: Breaking The Stalemate?”,  
*European Environment*, Vol.14,  
Hal. 317 – 330, Jhon Wiley & Sons,  
Ltd and ERP Environment, United  
Kingdom.

Turner, Brian S., et.al. (2009), “*The New  
Blackwell Companion to Social Theory*”,  
Blackwell Publishing, United  
Kingdom.